

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG TELAH DIMUTAKHIRKAN TAHUN 2020

SMAN 1 KECAMATAN HARAU

NO	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	KET
Pedoman Pelayanan Informasi Publik		
1	Tata cara permohonan informasi	√
2	Tata cara pengajuan keberatan	√
3	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang	√
4	Tata Cara Pengujian Konsekuensi	√
Formulir terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik:		
1	Formulir permohonan informasi publik	√
2	Formulir keluhan pelayanan	√
3	Formulir keberatan KIP	√
4	Formulir penyalahgunaan wewenang	√
Dasar Hukum Pelayanan Informasi Publik:		
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	√
2	Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	√
3	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	√
4	Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor KEP-224/01/05/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemberantasan Korupsi	√
Laporan Akses Informasi Publik		
1	Laporan Akses Informasi Publik 2019	x
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		
1	Laporan Pelayanan Informasi Publik 2019	√
Daftar Informasi Publik		
PROFILE		
Berkala		
1	Profil SMA Negeri 1 Kecamatan Harau	√
2	Sejarah SMA Negeri 1 Kecamatan Harau	√
3	Akreditasi Sekolah	√
4	Visi dan Misi	√
5	Struktur Organisasi	√
6	Buku Profil SMA Negeri 1 Kecamatan Harau	√
7	PPID	√
PERATURAN		
1	Tata Tertib Siswa SMA Negeri 1 Kecamatan Harau	√
2	Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	√
3	Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.	√
Risalah Rapat Majelis Guru		
1	Risalah Rapat Majelis Guru	√
2	Risalah Rapat Komite	√
PROGRAM / KEGIATAN		
RENCANA KERJA		
1	Rencana Kerja Jangka Menengah Tahun 2018 s.d 2021	√

NO	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	KET
RENKIN		
1	Rencana Kinerja (Renkin) 2019	x
2	Rencana Kinerja (Renkin) 2020	x
RENSTRA		
1	Rencana Strategis 2018	x
2	Rencana Strategis 2019	x
LAPORAN KEUANGAN		
1	Laporan BOS Tahun 2019	√
SERTIFIKAT AKREDITASI SEKOLAH		
1	Perpanjangan masa akreditasi sekolah	√
2	Sertifikat Akreditasi Sekolah Tahun 2018	√
PENGADAAN BARANG DAN JASA		
1	SPK Pembelian Buku Tahun 2019	√
DATA PERBENDAHARAAN / INVENTARIS BARANG MILIK NEGARA		
1	KIB Semester 1 tahun 2019	√
Serta Merta		
1	Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2019/2020	√
2	Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020/2021	√
3	Prosedur Peringatan Dini dan Evakuasi Keadaan Darurat di Sekolah	√
Tersedia setiap saat		
PRESTASI SEKOLAH		
1	Prestasi SMA Negeri Kecamatan Harau	√
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)		
1	SOP Layanan Publik SMA Negeri 1 Kecamatan Harau	√
2	SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP	√
3	SOP Pengujian tentang Konsekuensi	√
4	SOP Pendokumentasian IP	√
5	SOP Pendokumentasian informasi yang dikecualikan	√
6	SOP PPDB Tahun Pelajaran 2019/2020	√
7	SOP PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021	√
8	SOP Tamu	√
9	SOP Ruang Majelis Guru	√
10	SOP Rapat Kelas XII	√
11	SOP MoU dengan instansi lain	√
12	SOP Komite	√
PEDOMAN KEPEGAWAIAN		
1	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI	√
PEDOMAN KEPEGAWAIAN		
1	Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 008-A/SEK/SK/II/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI	√
2	Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2014 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	√
3	Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	√

NO	DAFTAR INFORMASI PUBLIK	KET
4	Peraturan Pemerintah RI No.14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil	√
5	Peraturan Pemerintah RI No.3 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil	√
6	Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	√
7	Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 Tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas Usia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional	√
8	Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim	√
9	Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil	√